



RENCANA KERJA 2023



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BONE





**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, maka diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1926);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 41);
19. Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 107);

20. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahunberjalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud:

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- Bab V : Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

Lampiran I	: Dinas Pendidikan
Lampiran II	: Dinas Kesehatan
Lampiran III	: BLUD RSUD Tenriawaru
Lampiran IV	: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Lampiran V	: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi
Lampiran VI	: Satuan Polisi Pamong Praja
Lampiran VII	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Lampiran VIII	: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Lampiran IX	: Dinas Sosial
Lampiran X	: Dinas Ketenagakerjaan
Lampiran XI	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lampiran XII	: Dinas Ketahanan Pangan
Lampiran XIII	: Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran XIV	: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Lampiran XV	: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Lampiran XVI	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Lampiran XVII	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Lampiran XVIII	: Dinas Perhubungan
Lampiran XIX	: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Lampiran XX	: Dinas Koperasi
Lampiran XXI	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Lampiran XXII	: Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Lampiran XXIII	: Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik
Lampiran XXIV	: Dinas Kebudayaan
Lampiran XXV	: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Lampiran XXVI	: Dinas Pariwisata
Lampiran XXVII	: Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Lampiran XXVIII	: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Lampiran XXIX	: Dinas Perindustrian
Lampiran XXX	: Dinas Perdagangan
Lampiran XXXI	: Dinas Perikanan
Lampiran XXXII	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lampiran XXXIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran XXXIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran XXXV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI	: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII	: Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII	: Sekretariat DPRD

Lampiran XXXIX	: Sekretariat Daerah
Lampiran XL	: Kecamatan Lamuru
Lampiran XLI	: Kecamatan Dua Boccoe
Lampiran XLII	: Kecamatan Sibulue
Lampiran XLIII	: Kecamatan Barebbo
Lampiran XLIV	: Kecamatan Cina
Lampiran XLV	: Kecamatan Mare
Lampiran XLVI	: Kecamatan Awangpone
Lampiran XLVII	: Kecamatan Tellu Siattinge
Lampiran XLVIII	: Kecamatan Cenrana
Lampiran XLIX	: Kecamatan Ajangale
Lampiran L	: Kecamatan Amali
Lampiran LI	: Kecamatan Palakka
Lampiran LII	: Kecamatan Ulaweng
Lampiran LIII	: Kecamatan Bengo
Lampiran LIV	: Kecamatan Tellu Limpoe
Lampiran LV	: Kecamatan Lappariaja
Lampiran LVI	: Kecamatan Patimpeng
Lampiran LVII	: Kecamatan Ponre
Lampiran LVIII	: Kecamatan Libureng
Lampiran LIX	: Kecamatan Bontocani
Lampiran LX	: Kecamatan Kahu
Lampiran LXI	: Kecamatan Kajuara
Lampiran LXII	: Kecamatan Tonra
Lampiran LXIII	: Kecamatan Salomekko
Lampiran LXIV	: Kecamatan Tanete Riattang
Lampiran LXV	: Kecamatan Tanete Riattang Barat
Lampiran LXVI	: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023, Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI BONE,


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 39

**LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG RANCANGAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2023**

**RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BONE
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia – Nya, kami telah selesai menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

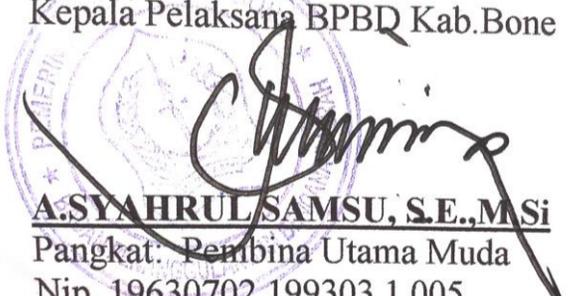
Rencana Kerja (Renja) yang kami susun ini adalah merupakan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone selama Tahun 2023 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) 2018 – 2023, Visi, Misi dan diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

Insy Allah Rencana Kerja (Renja) ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini hingga selesai.

Watampone, 25 Juli 2022

Kepala Pelaksana BPBD Kab.Bone



A.SYHRULSAMSU, S.E.,MSi

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19630702 199303 1 005

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERBUP RENJA 2023	ii
SAMPUL DALAM.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	8
Tabel T-C.29 terlampir	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
Tabel T-C. 30 terlampir	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	34
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	36
Tabel T-C. 31 terlampir	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	47
Tabel T-C. 32 terlampir	
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	50
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	51
3.3 Program dan Kegiatan	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	56
4.1 Gambaran Umum.....	56
4.2 Program dan Kegiatan	56
Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2022 Dan Prakiraan Maju Tahun 2023 terlampir	
BAB V PENUTUP.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 sebagai sebuah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023.

Dokumen Renja ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah

yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;

- c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif OPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD

Dokumen Renja ini merupakan rencana pembangunan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT) Organisasi Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban. Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang di emban BPBD Kab. Bone. Sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone dan sekaligus untuk melakukan pengukuran kinerja

instansi pemerintah sebagaimana ketentuan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023, Landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai berikut:

- 1). Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
- 2). Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
- 3). Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4). Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5). Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6). Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 - 7). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 - 8.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 9.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 10.) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 11.) Peraturan Daerah Kabupaten Bone No.3 Tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2018-2023;
 - 12). Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone;
 - 13). Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 8);

- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Periode 2018-2023;
- 15). Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 9);
- 16). Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- 17). Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 yang dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone mampu menjawab tuntutan lingkungan yang berkenaan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan logistik, serta penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga mampu dan eksis dalam rangka meningkatkan kinerja profesional.

Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bone sesuai dengan perencanaan serta dapat berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, Bab ini berisikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu, Bab ini berisi evaluasi hasil pelaksanaan renja yang digunakan untuk mengukur kinerja Pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone dalam bentuk indikator kinerja hasil (outcome) dari pelaksanaan program-program pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, selain itu bab ini juga berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi pelayanan dan penentuan isu-isu strategis terhadap lingkungan baik internal maupun lingkungan eksternal.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan, Bab ini berisikan tujuan dan sasaran unsur-unsur Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi yang diembannya. Strategi dan kebijakan tentang arah pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone dan dilengkapi uraian program kerja operasional beserta kegiatan inidikatifnya yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2023. Termasuk juga penjelasan umum dan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, Bab ini berumusan rencana program dan kegiatan dan pagu dan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2023 serta perkiraan maju Tahun Anggaran 2024.

Bab V. Penutup, Bab ini berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023, khususnya arahan dalam menggunakan Renja sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Anggaran yang tersedia untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dilakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (*input*) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone (Anggaran Tahun 2021

Anggaran sebelum perubahan APBD	Rp. 4.564.744.196
Penambahan APBD	<u>Rp. 1.033.707.433</u>
Anggaran setelah perubahan	Rp. 5.598.451.629
Realisasi	<u>Rp. 5.097.635.683</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp. 500.815.946

Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tersebut dilakukan melalui pembobotan bertingkat setiap tahapan dengan membandingkan target kinerja tahun lalu dengan capaian Rencana Strategis yang disertai dengan pembiayaan.

Dengan memperhatikan Rencana Strategik dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, maka capaian kerja sasaran strategik secara kuantitatif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone tahun 2021, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/BONE

1. Kegiatan perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kebutuhan dalam menyusun dokumen perencanaan dapat terlaksana dengan dana sebesar Rp.117.584.000,- terealisasi sebesar Rp.109.217.400,- atau 92% sisa dana sebesar Rp.8.366.600,-

- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, telah terlaksana sesuai dengan laporan capaian dan realisasi kinerja BPBD, sehingga proses kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Dengan alokasi dana Rp.31.930.000,- dengan realisasi sebesar Rp.28.740.000,- atau 90% dengan sisa dana Rp.3.190.000,-

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kebutuhan dalam evaluasi kinerja perangkat daerah dapat terpenuhi namun terdapat dana sebesar Rp.22.790.000,- dengan realisasi sebesar Rp.21.750.000,- atau 99% sisa dana sebesar Rp.1.040.000,-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

Sub kegiatan:

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kebutuhan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dapat berjalan dengan lancar, dengan alokasi dana Rp.2.006.353.168,- dengan realisasi Rp. 1.950.627.132,- atau 97,22% dengan sisa dana Rp.55.726.036,-

3. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dapat berjalan dengan lancar, dengan alokasi dana Rp.67.813.829,- dengan realisasi Rp.67.497.525,- atau 99,53% dengan sisa dana Rp.316.304,-

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyediaan bahan logistik kantor dapat tersedia, Dengan alokasi dana Rp.46.464.000,- dengan realisasi 45.879.800,- atau 98,74 % dengan sisa dana Rp.584.200,-

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan dapat tersedia, dengan alokasi dana Rp. 50.104.550,- dengan realisasi Rp.41.052.200,- atau 81,93% dengan sisa dana Rp.9.052.700,-

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar, dengan alokasi dana Rp. 257.008.000,- dengan realisasi Rp. 180.763.515,- atau 70,33% dengan sisa Rp.76.244.485,-

- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD dapat dilakukan, dengan alokasi dana Rp. 15.000.000,- dengan realisasi Rp. 15.000.000,- atau 100%

4. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub kegiatan :

- Pengadaan Mebel

Pengadaan Mebel, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga pengadaan mebel dapat dilakukan, dengan alokasi dana 19.500.000,- dengan realisasi 19.500.000,- atau 100%

- Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya,

Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga pengadaan peralatan mesin lainnya dapat dengan lancar, dengan

alokasi dana Rp.128.820.000,- dengan realisasi Rp.128.820.000,-
atau 100 %

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dapat tersedia, dengan alokasi dana 86.940.000,- dengan realisasi Rp.82.528.077,- atau 94,92% dengan sisa Rp.4.411.923,-

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga jasa pelayanan umum kantor dapat tersedia, dengan alokasi dana Rp.137.724.000,- dengan realisasi Rp.133.805.651,- atau 97,15 % dengan sisa 3.918.349,-

6. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Penyediaan pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dapat tersedia. Dengan alokasi dana Rp.212.877.900,- dengan realisasi Rp. 201.392.670,- atau 94,60% dengan sisa Rp.11.485.230,-

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga, pemeliharaan peralatan dan mesin dapat dilakukan, dengan alokasi dana Rp.14.484.750,- dengan realisasi Rp. 14.484.750,- atau 100 %

- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan dapat terlaksana, dengan alokasi dana Rp.12.134.586,- dengan realisasi Rp.12.132.000,- atau 99,97 % dengan sisa dana 2.586,-

II.PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Sosialisasi, komunikasi ,informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana)

Sosialisasi, komunikasi ,informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana) telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kabupaten /kota dapat terlaksana, dengan alokasi dana Rp.41.767.000 ,- dengan realisasi Rp.36.407.000,- atau 87,16 dengan sisa dana sebesar Rp. 5.360.000,-

2. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Sub kegiatan:

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyusunan rencana penanggulangan bencana dapat terlaksana, dengan alokasi dana Rp.53.990.000,- dengan realisasi Rp.35.989.800,- atau 66,66% dengan sisa Rp.18.000.200,-

- Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penguatan kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dapat terlaksana, dengan alokasi dana Rp.57.485.700,- dengan realisasi Rp.53.085.700,- atau 92,34% dengan sisa Rp.4.400.000,-

- Penanganan pasca bencana kabupaten/kota

Penanganan pasca bencana kabupaten/kota telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penanganan pasca bencana dapat berjalan lancar, dengan alokasi dana Rp.968.550.796,- dengan realisasi Rp.709.055.160,- atau 73,20% dengan sisa 259.495.636,-

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub kegiatan:

- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kabupaten/kota dapat dilakukan,

dengan alokasi dana RP.1.214.279.000,- dengan realisasi Rp.1.175.929.301,- atau 96,84% dengan sisa Rp.38.349.699,-

- Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyediaan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota dapat terlaksana, dengan alokasi dana Rp.34.850.000,- dengan realisasi Rp.34.850.000,- atau 100%.

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 Anggaran Berjalan

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kebutuhan dalam menyusun dokumen perencanaan dapat terlaksana dengan sisa dana sebesar Rp.5.946.000,- atau terealisasi sebesar Rp.13.550.000,- atau 69,50% dari jumlah dana sebesar Rp.19.496.000,-
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, telah terlaksana sesuai dengan laporan

capaian dan realisasi kinerja BPBD, sehingga proses kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Dengan alokasi dana Rp.31.087.520,- dengan realisasi sebesar Rp.21.442.250,- atau 68,97% dengan sisa dana Rp.9.645.270,-

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kebutuhan dalam evaluasi kinerja perangkat daerah dapat terpenuhi namun terdapat sisa Rp.8.992.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.808.000,- atau 29,75% dari jumlah dana 12.800.000

7. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

Sub kegiatan:

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kebutuhan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dapat berjalan dengan lancar, dengan alokasi dana Rp.1.945.887.820,- dengan realisasi 649.941.153,- atau 33,40% dengan sisa dana Rp.1.295.946.667,-

8. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dapat berjalan dengan lancar, dengan alokasi dana Rp.89.028.927,- dengan realisasi Rp.43.029.450,- atau 48,33 % dengan sisa dana Rp.45.999.477,-

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyediaan bahan logistik kantor dapat tersedia, Dengan alokasi dana Rp.75.675.000,- dengan realisasi Rp.20.373.000,- atau 26,92% dengan sisa Rp.55.302.000,-

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyediaan barang cetak dan penggandaan dapat tersedia, dengan alokasi dana Rp.29.650.000,- dengan realisasi Rp.9.389.700,- atau 31,66 % dengan sisa dana Rp.20.260.300,-

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dapat berjalan dengan tertib dan lancar, dengan alokasi dana Rp.384.306.000,- dengan realisasi Rp.135.031.908,- atau 35,15% dengan sisa Rp.249.274.092,-

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik dapat tersedia, dengan alokasi dana 60.675.000,- dengan realisasi Rp.21.852.468,- atau 36% dengan sisa Rp.38.822.532,-

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga jasa pelayanan umum kantor dapat tersedia, dengan alokasi dana Rp.132.244.800,- dengan realisasi Rp.54.604.152,- atau 41,29% dengan sisa Rp.77.640.648,-

10. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dapat tersedia. Dengan alokasi dana Rp.131.460.000,- dengan realisasi Rp.45.570.550,- atau 34,66% dengan sisa Rp.85.889.450,-

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga, pemeliharaan peralatan dan mesin dapat dilakukan, dengan alokasi dana Rp.39.453.530,- dengan realisasi Rp.18.844.330,- atau 47,76 % sisa dana sebesar Rp.20.609.200,-

- Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya, telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan dapat terlaksana, dengan alokasi dana

Rp.11.313.800,- dengan realisasi Rp.2.536.000,- atau 22,41%
dengan sisa dana 8.777.800,-

II.PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Sub kegiatan :

- Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana)

Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana) telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kabupaten /kota dapat terlaksana, dengan alokasi dana Rp.20.518.000,- dengan realisasi Rp.9.140.000,- atau 44,54% dengan sisa dana Rp.11.378.000,-

2. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Sub kegiatan:

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyusunan rencana penanggulangan bencana dapat terlaksana, dengan alokasi dana Rp.96.870.000,- dengan realisasi Rp.11.390.000,- atau 11,75% dengan sisa Rp.85.480.000,-

- Penanganan pasca bencana kabupaten/kota

Penanganan pasca bencana kabupaten/kota telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penanganan pasca bencana dapat berjalan lancar, dengan alokasi

dana Rp.457.310.000,- dengan realisasi Rp.20.442.000,- atau 4,47% dengan sisa Rp.436.868.000,-

- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana terlaksana dengan adanya dukungan dana sebesar Rp.51.648.000,- terealisasi Rp.4.080.000 atau 7,89% dengan sisa dana Rp.47.568.000,-

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub kegiatan:

- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban kabupaten/kota dapat dilakukan, dengan alokasi dana Rp.1.279.300.000,- dengan realisasi Rp.441.014.000,- atau 34,47% dengan sisa Rp.838.286.000,-

- Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota

Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota telah terlaksana sesuai yang diharapkan karena adanya dukungan dana yang cukup sehingga penyediaan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten /Kota dapat terlaksana, dengan alokasi dana Rp. 55.820.950,- dengan realisasi Rp.48.221.800 atau 86,38% sisa dana sebesar Rp.7.599.150,-

Sedangkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone sampai Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

**Nama Perangkat Daerah : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH**

lembar.....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2021)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1										
1	5									
1	05	01								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
			Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah							

1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja								
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	7	2	2	2	100%	2	6	86%
						Jumlah Dokumen Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	15	5	5	5	100%	5	15	100%
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	3	1	1	1	0%	1	3	100%
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi yang Tersusun	6	3	2	3	150%	2	8	133%
						Jumlah pameran pembangunan yang Diikuti	2	1	1	1	0%	0	2	100%
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Evaluasi Perangkat Daerah	3	1	1	1	0%	1	3	100%

1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan								
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan beserta Tambahan Penghasilan Bulanan Bagi ASN	36	12	12	12	100%	12	36	100%
1	05	01	2.06		Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum								
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor sesuai Rencana Kebutuhan	108	24	24	24	100%	36	84	78%
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Tamu sesuai Rencana Kebutuhan	36	12	12	12	100%	12	36	100%
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan sesuai Rencana Kebutuhan	72	24	24	24	100%	24	72	100%
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan yang diikuti dalam rangka koordinasi dan konsultasi	240	75	75	75	100%	80	230	96%

1	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Pemeliharaan website Aplikasi/Data Base yang dikelola	2	1	1	1	100%	0	2	100%
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah								
1	05	01	2.07	05	Pegadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur	5	1	1	1	100%	0	2	40%
1	05	01	2.07	06	Pegadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10	1	1	1	100%	0	2	20%
						Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	5	5	5	5	100%	0	10	200%
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang								
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Rekening Air dan Listrik yang Terbayar	72	24	24	24	100%	24	72	100%
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi yang Mendapatkan Jasa Keuangan Selama Setahun	3900	1224	1224	1224	100%	1290	3738	96%

1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Jumlah sekolah yang menjadi sasaran Sosialisasi penanggulangan Bencana	50	30	30	30	100%	5	65	130%
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan PRB yang dilaksanakan	3	1	1	1	100%	0	2	67%
						Jumlah penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	2	0	0	0	0%	1		
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Pemantauan Lokasi Daerah Rawan Bencana	162	81	81	81	100%	0	162	100%
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan evakuasi Pascabencana	3	1	1	1	0%	1	3	100%

						Jumlah Lokasi yang didentifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	192	81	81	81	100%	30	192	100%
						Jumlah Paket Rehabilitasi/Pemeliharaa n jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	9	2	2	2	100%	2	6	67%
						Jumlah Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang Tersusun	2	0	0	0	0%	1	1	50%
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
1	05	03	2.03	03	Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/kota	Jumlah Jasa/Upah Kerja dan Makan Minum TRC yang Melakukan posko siaga bencana	3420	1104	1104	1104	100%	960	3168	93%
						Jumlah korban berhasil dicari, ditolong, dan evakuasi terhadap kejadian bencana (KK/Jiwa)	26502	8834	8834	8834	100%	8834	26502	100%

1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan evakuasi Korban bencana	Jumlah Kebutuhan Dasar yang tersalur Terhadap Korban Bencana	16	6	6	6	100%	4	16	100%
						Jumlah penyiapan kebutuhan Dasar Terhadap Korban bencana	10	4	4	4	100%	0	8	80%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

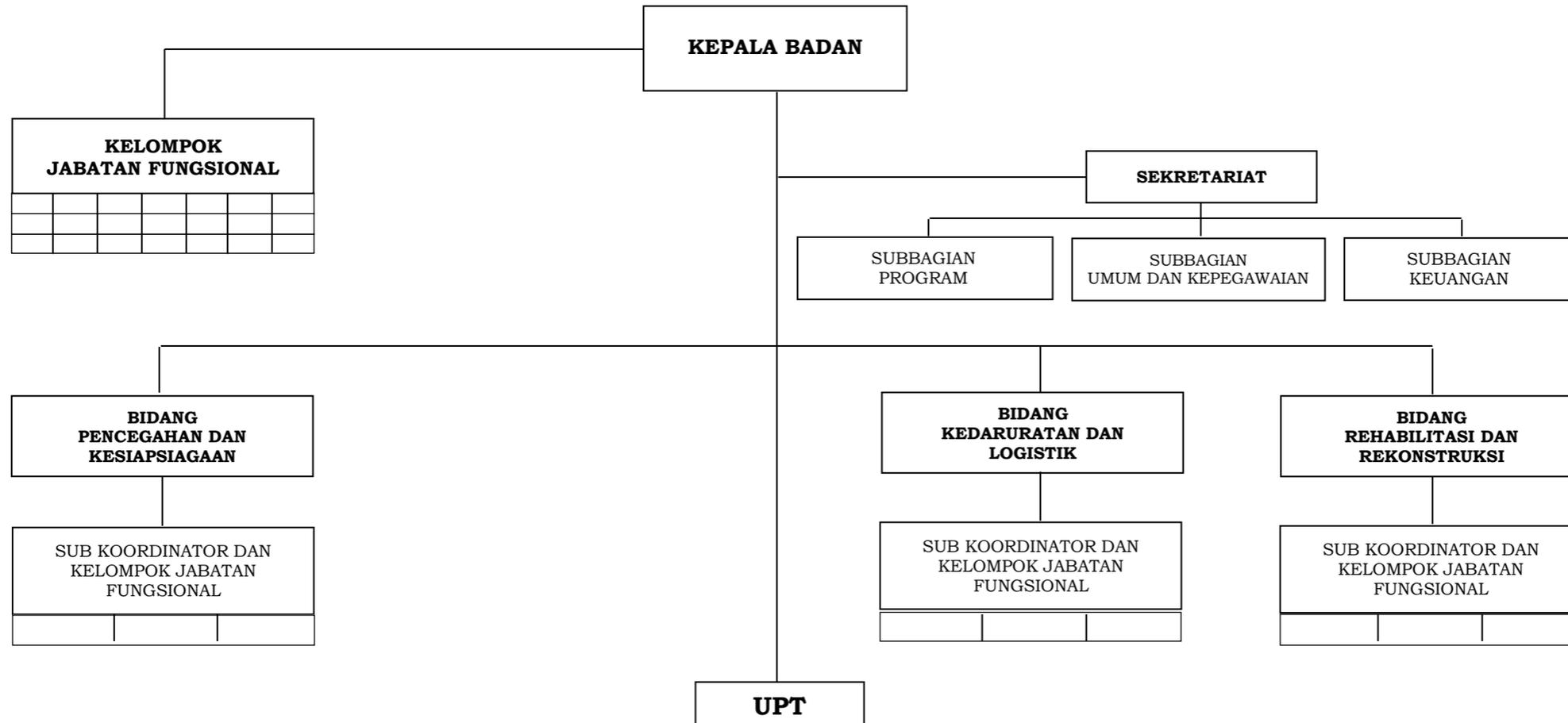
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone..

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi Prabencana, Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana.

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONE**



Dalam pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Penetapan sistem kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap pelaksanaan kegiatan mencapai visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Sesuai dengan tugas pokok adalah sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dilakukan secara tangguh (efektif dan efisien) dapat terwujud, jika terdapat sinergitas peran antara pemerintah dan masyarakat.
- b) Mewujudkan partisipasi masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilandasi oleh kebersamaan, kemitraan,keberdayaan, dan ketrpaduan serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang diwarisi masyarakat kabupaten Bone.

Permasalahan yang dimiliki serta dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone diuraikan didalam analisa sistem, faktor yang mempengaruhi kondisi internal dan kondisi eksternal sebagaimana uraian berikut :

1. Faktor Lingkungan Internal

- Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Bone
- Masih tersebar dan belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi
- Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana

- Kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana dan masih berjalan secara sektoral
- Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
- Beban kerja dan jumlah personil yang terbatas termasuk Sumber Daya Manusia yang kurang memadai.

2. Faktor Lingkungan Eksternal

- Penganggaran di tingkat Pemerintah Kabupaten kurang sesuai dengan hasil musrembang sehingga usulan kegiatan mitigasi struktural dan non struktural kurang mendapat perhatian dan prioritas
- Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan –kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Kementerian/Instansi selai Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing- masing Satuan Perangkat Daerah bagi kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Indonesia
- Adanya Perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam
- Adanya keterbatasan sarana komunikasi dikecamatan/kelurahan sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke Kabupaten
- Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.

TABEL 2 Terlampir..

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	85%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	-	-	26%	41%	56%	70%	85%	100%	11%	243%	178%	142%	41%	56%	70%	85%	100%	
3	Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	-	-	78%	82%	86%	90%	95%	100%	74%	52%	104%	78%	82%	86%	90%	95%	100%	
4	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	-	-	CC	B	B	BB	BB	A	C	B	B	BB	B	B	BB	BB	A	
6	Persentase Rata -Rata Capaian Kinerja Program Teknis Badan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	85	90	95	-	-	-	103%	85	90	95	90	95	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Meninjau keadaan geografis, geologis, hidrologis dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kabupaten Bone memiliki daerah rawan terhadap terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, faktor manusia, faktor sosial, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Bone telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya dalam hal penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan pula bahwa kejadian bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya. Hal ini berdampak lanjut menjadi potensi penghambat laju pembangunan Kabupaten Bone yang telah menjadi agenda maupun skala prioritas para pemangku kepentingan (Stake holder), sehingga distorsi-distorsi pembangunan semacam itu perlu dicegah dan diantisipasi sedini mungkin, jika seandainya penanganan penanggulangan bencana dapat dilakukan secara sistematis, diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap percepatan penanganan penanggulangan bencana dan meminimalisasikan kemungkinan kerusakan yang lebih parah terhadap aset-aset hasil pembangunan yang dimiliki baik pemerintah sendiri maupun masyarakat secara umum. Hal ini karena penanganan bencana yang sistematis dapat membantu mempercepat pulihnya kondisi ketahanan sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat dalam menghadapi bencana dan memperbaiki kondisi lingkungannya. Terlebih

paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen pengurangan resiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sedangkan yang menjadi kelemahan dan ancaman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone antara lain :

- Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Kementerian / Instansi selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing Satuan Perangkat Daerah bagi kegiatan penyelenggaraan Penanggulangan bencana;
- Luasnya Cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam;
- Adanya keterbatasan sarana komunikasi di tingkat kecamatan/kelurahan dan desa sehingga menghambat ketetapan penyebaran arus data kabupaten/kota;
- Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam yang ada didunia.

Namun demikian kondisi ekonomi di wilayah Kabupaten Bone 2013 sampai sekarang yang diperkirakan akan cenderung stabil bahkan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan kebijakan nasional yang ditetapkan dan menjadikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone untuk terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana.

1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan awal Renja BPBD dirumuskan setelah adanya usulan dari pemangku kepentingan. Telaahan rancangan awal Renja dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra BPBD dan tingkat kinerja yang dicapai, serta pagu indikatif yang tersedia.

Hasil rewiuw terhadap rancangan awal Renja disesuaikan dengan hasil identifikasi program dan kegiatan prioritas, indikator dan target kinerja program dan kegiatan (output dan outcome) serta pagu indikatif yang dialokasikan. Secara umum, usulan program dan kegiatan tidak berbeda dengan rancangan awal Renja yang telah disusun sebelumnya.

Review terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam table berikut :

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Lembar.....dari...
.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tanete Riattang Barat	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100%	3,962,465,950	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tanete Riattang Barat	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100%	3,962,465,950	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanete Riattang Barat	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	100%	216,978,880	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanete Riattang Barat	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	100%	216,978,880	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanete Riattang Barat	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen	26,951,760	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tanete Riattang Barat	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen	26,951,760	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tanete Riattang Barat	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	170,411,840	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Tanete Riattang Barat	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	170,411,840	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanete Riattang Barat	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Laporan	19,615,280	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tanete Riattang Barat	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Laporan	19,615,280	
	Administrasi Keuangan	Tanete Riattang Barat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100%	2,014,116,250	Administrasi Keuangan	Tanete Riattang Barat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	100%	2,014,116,250	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanete Riattang Barat	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang/bulan	2,014,116,250	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tanete Riattang Barat	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 orang/bulan	2,014,116,250	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tanete Riattang Barat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	123,375,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tanete Riattang Barat	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100%	123,375,000	

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tanete Riattang Barat	Jumlah paket penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	135 Paket	101,250,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tanete Riattang Barat	Jumlah paket penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	135 Paket	101,250,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanete Riattang Barat	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	22,125,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tanete Riattang Barat	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	22,125,000	
	Administrasi Umum	Tanete Riattang Barat	Presetase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	851,499,320	Administrasi Umum	Tanete Riattang Barat	Presetase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	851,499,320	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanete Riattang Barat	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	94,669,520	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanete Riattang Barat	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	94,669,520	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanete Riattang Barat	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	232,794,800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tanete Riattang Barat	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Paket	232,794,800	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanete Riattang Barat	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	25,105,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanete Riattang Barat	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12 paket	25,105,000	
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanete Riattang Barat	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	85 laporan	498,930,000	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Tanete Riattang Barat	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	85 laporan	498,930,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanete Riattang Barat	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	171,381,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tanete Riattang Barat	Persentase pengadaan barang milik daerah	100%	171,381,000	
	Pengadaan Mebel	Tanete Riattang Barat	Jumlah paket mebel yang disediakan	11 unit	49,237,000	Pengadaan Mebel	Tanete Riattang Barat	Jumlah paket mebel yang disediakan	11 unit	49,237,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanete Riattang Barat	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	13 unit	122,144,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanete Riattang Barat	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	13 unit	122,144,000	
	Peediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Tanete Riattang Barat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	280,755,000	Peediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Tanete Riattang Barat	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	280,755,000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanete Riattang Barat	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	60,675,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanete Riattang Barat	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	60,675,000	
	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Tanete Riattang Barat	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	220,080,000	Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	Tanete Riattang Barat	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	220,080,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinntah Daerah	Tanete Riattang Barat	Persenntase Pelaksanaan Pemmeliharaan Barang Milik Daerah	100%	304,360,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinntah Daerah	Tanete Riattang Barat	Persenntase Pelaksanaan Pemmeliharaan Barang Milik Daerah	100%	304,360,500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanete Riattang Barat	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 unit	211,810,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tanete Riattang Barat	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	14 unit	211,810,000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanete Riattang Barat	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	14,550,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tanete Riattang Barat	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 unit	14,550,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanete Riattang Barat	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	78,000,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tanete Riattang Barat	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	78,000,500	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tanete Riattang Barat	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100%	2,071,649,650	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tanete Riattang Barat	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100%	2,071,649,650	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tanete Riattang Barat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	701.678 orang	37,430,000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tanete Riattang Barat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	701.678 orang	37,430,000	

	Sosialisasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Tanete Riattang Barat	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (Per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada dikawasan tempat tinggalnya	700.311 orang	37,430,000	Sosialisasi , Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Tanete Riattang Barat	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (Per jenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada dikawasan tempat tinggalnya	700.311 orang	37,430,000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tanete Riattang Barat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4.300 orang	408,941,400	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tanete Riattang Barat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4.300 orang	408,941,400	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Tanete Riattang Barat	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi	1 Dokumen	17,028,000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Tanete Riattang Barat	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana yang dilegalisasi	1 Dokumen	17,028,000	

	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Tanete Riattang Barat	Jumlah warga negara dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	150 orang	19,500,000	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Tanete Riattang Barat	Jumlah warga negara dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	150 orang	19,500,000	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tanete Riattang Barat	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu, warga negara, keluarga, mauoun petugas	20 unit	53,054,000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tanete Riattang Barat	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu, warga negara, keluarga, mauoun petugas	20 unit	53,054,000	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tanete Riattang Barat	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	10 kawasan	28,298,000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Tanete Riattang Barat	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	10 kawasan	28,298,000	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Bone	Jumlah laporan hasil penanganan pasca bencana	37 laporan	249,781,400	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Bone	Jumlah laporan hasil penanganan pasca bencana	37 laporan	249,781,400	
		Kab. Bone	Jumlah Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	1 paket			Kab. Bone	Jumlah Paket Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	1 paket		

	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tanete Riattang Barat	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	200 orang	41,280,000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Tanete Riattang Barat	Jumlah aparaturnya dan warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan	200 orang	41,280,000	
	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bone	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1977 orang	1,625,278,250	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Bone	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1977 orang	1,625,278,250	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Tanete Riattang Barat	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 Dokumen	34,045,560	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Tanete Riattang Barat	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat	1 Dokumen	34,045,560	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Kota	Tanete Riattang Barat	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	8834 orang	1,554,701,440	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Kota	Tanete Riattang Barat	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	8834 orang	1,554,701,440	

	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bone	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	5026 orang	36,531,250	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bone	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	5026 orang	36,531,250	
--	---	-----------	---	------------	------------	---	-----------	---	------------	------------	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana dengan kegiatan penyebarluasan informasi penanggulangan bencana melalui brosur, leafflet, spanduk, buku dan lain-lain, Program Peningkatan Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana melalui kegiatan pembentukan relawan penanggulangan bencana, dan kegiatan penyuluhan dan pelatihan relawan penanggulangan bencana, Program Diklat Aparatur Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan Aparatur dalam bidang kebencanaan, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana melalui kegiatan Pemberdayaan posko siaga bencana, dan kegiatan pemantauan daerah rawan bencana, Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana melalui kegiatan peninjauan dan penanganan korban dilokasi bencana dan kegiatan penyiapan dan penyaluran kebutuhan dasar terhadap korban bencana, serta kegiatan Penyiapan hunian sementara bagi korban bencana dan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan melalui kegiatan Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana melalui kegiatan identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian akibat bencana, dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan . Terbentuknya Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Bone; Program Penanggulangan Bencana dengan sasaran mewujudkan sistem penyelenggaraan Peneggulangan Bencana yang Tangguh, Cepat danm Tepat serta handal dalam hal penanganan prabencana, tanggap darurat (saat bencana), pasca bencana serta terwujudnya sistem kedaruratan bencana efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, serta peningkatan

sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara efektif dan efisien serta terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan dan pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Sasaran Peningkatan Aparatur, Program Pengembangan Data/Informasi serta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Adapun besarnya flapon anggaran program prioritas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 dan atas dasar tersebut anggaran tersebut masih dianggap masih kurang dilihat dari intensitas kegiatan dan kejadian bencana yang tidak dapat diprediksikan pada setiap tahun.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terdampak Bencana	Dusun Turungeng Desa Sijelling Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terdampak Bencana	1 Paket	
2.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terdampak Bencana	Dusun Mabbatue Desa Tenri Pakkua Kec. Lappariaja	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terdampak Bencana	1 Paket	
3.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terdampak Bencana	Dusun Larokka Desa Carigading Kec. Awangpone	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terdampak Bencana	1 Paket	
4.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terdampak Bencana	Desa Tellu Boccoe Kec. Ponre	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terdampak Bencana	1 Paket	
5.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terdampak Bencana	Dusun Bira 3 Desa Tellang Kere Kec. Tellu Limpoe	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terdampak Bencana	1 Paket	
6.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	Dusun Ajjalireng 1 Kec. Tellu Siattinge	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana	1 Paket	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
3. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
4. Menetapkan Standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut maka Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 ini disusun dengan memperhatikan arah kebijakan nasional bidang penanggulangan bencana yang masuk dalam prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, yang diarahkan kepada pengarusutamaan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah, penguatan kapasitas penanggulangan bencana dipusat dan didaerah, optimalisasi instrument pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan resiko bencana, mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, peningkatan

sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan, serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone untuk periode satu tahun anggaran yang mempunyai fungsi :

- a) Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone (Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi), karena memuat seluruh kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone;
- b) Menciptakan kepastian kebijakan , yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Bone;
- c) Menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran selama satu tahun.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan di Bidang Kebencanaan, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain:

1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan Penanggulangan Bencana

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone adalah untuk mewujudkan masyarakat sejaterah

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

- b. Meningkatnya Kesiapsiagaan Penanggulangan dan Penanganan Pemulihan Pasca Bencana.

3.3. Program dan Kegiatan

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa program dan kegiatan yang telah ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Bone Pada Rencana Kerja Tahun 2023 ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor terkait dengan kebijakan nasional dan isu-isu di wilayah daerah kabupaten Bone, sebagai berikut :

1. Pengarusutamaan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas
2. Optimalisasi instrument pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan resiko bencana;
3. Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam upaya penanggulangan bencana;
4. Mendorong dan berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat sehat yang mandiri yang merupakan salah faktor pendorong peningkatan indeks pembangunan manusia;
5. Mendorong dan berpartisipasi dalam pengembangan data dan informasi dalam hal penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan ekonomi;
6. Peningkatan Sumber Daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan;
7. Percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana;
8. Visi Misi Pembangunan Kabupaten Bone;
9. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023.

Sedangkan Rencana Kerja untuk Program dan Kegiatan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Badan Penanggulangan Bencana
- Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

b. Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota

Sub kegiatan:

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub kegiatan:

- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota
- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub kegiatan :

- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota
- Penyediaan logistic penyelamatan dan korban bencana kabupaten/kota.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Gambaran Umum

Kegiatan adalah media untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang akan dilakukan untuk menilai tingkat capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil sebagaimana yang telah direncanakan BPBD guna mencapai sasaran. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelayanan penanggulangan bencana dapat diatasi sesuai dengan dukungan sumberdaya yang tersedia.

4.2 Program dan Kegiatan

Berdasarkan arah kebijakan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone serta pertimbangan pagu anggaran yang ada maka prioritas program kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah Kabupaten/ Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggungara	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan,penganggungara n dan evaluasi kinerja perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah • Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Evaluasi Kinerja

	<p>n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p>		<p>Perangkat Daerah</p>
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi keuangan Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya • Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi umum perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Mebel • Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
2.	Program Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

			<p>Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota • Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana • Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan • Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota • Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota • Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota • Penyediaan logistic penyelamatan dan korban bencana kabupaten/kota

Tabel T-C 33

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1 05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											6,034,115,600	7,669,445,000
1 05 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											3,962,465,950	4,928,445,000
1 05 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											216,978,880	295,500,000
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	9 Dokumen	100 Persen	26,951,760	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	82,500,000
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	3 Laporan	100 Persen	170,411,840	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	188,000,000
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	10 Laporan	100 Persen	19,615,280	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	25,000,000
1 05 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2,014,116,250	2,420,000,000
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	21 Orang/bulan	100 Persen	2,014,116,250	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	2,420,000,000
1 05 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											123,375,000	376,025,000
1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	135 Paket	100 Persen	101,250,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	120,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Orang	100 Persen	22,125,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	256,025,000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								851,499,320					903,500,000
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	100 Persen	94,669,520	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	105,000,000
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	100 Persen	232,794,800	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	260,000,000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Paket	100 Persen	25,105,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	38,500,000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	85 Laporan	100 Persen	498,930,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	500,000,000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								171,381,000					275,220,000
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan barang milik daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	11 Unit	100 Persen	49,237,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	55,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan barang milik daerah	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	13 Unit	100 Persen	122,144,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	220,220,000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								280,755,000				316,700,000	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	60,675,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	73,700,000
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	220,080,000	Pajak Daerah		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	243,000,000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								304,360,500				341,500,000	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daera	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	14 Unit	100 Persen	211,810,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	233,000,000
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daera	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	25 Unit	100 Persen	14,550,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	27,500,000
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daera	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	2 Unit	100 Persen	78,000,500	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	100 Persen	81,000,000
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								2,071,649,650				2,741,000,000	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								37,430,000				42,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	700331 Orang	100 Persen	37,430,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100 Persen	42,000,000
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					408,941,400				559,000,000				
1	05	03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	17,028,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100 Persen	27,500,000
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	150 Orang	100 Persen	19,500,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100 Persen	38,500,000
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	20 Unit	100 Persen	53,054,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100 Persen	77,000,000
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Kawasan	100 Persen	28,298,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100 Persen	66,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Tolok Ukur	Target				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
					Program		Keluaran Sub Kegiatan							Hasil Kegiatan	
1 05 03 2.02 07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan hasil penanganan pasca bencana Jumlah paket rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan yang terdampak bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	37 laporan 1 Paket	100 Persen	249,781,400	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100 Persen	300,000,000	
1 05 03 2.02 10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	200 Orang	100 Persen	41,280,000	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100 Persen	50,000,000	
1 05 03 2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								1,625,278,250					2,140,000,000	
1 05 03 2.03 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	34,045,560	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100 Persen	40,000,000	
1 05 03 2.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Bone, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	8834 Orang	100 Persen	1,554,701,440	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100 Persen	2,000,000,000	
1 05 03 2.03 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kab. Bone, Tanete Riattang Barat, Macanang	100 Persen	5026 Orang	100 Persen	36,531,250	Pajak Daerah Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	100 Persen	100,000,000	
TOTAL									6,034,115,600					7,669,445,000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone sebagai rencana jangka pendek dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) 2018 – 2023 dan Renstra Perubahan (Renstra Perubahan) 2018-2023, Visi dan Misi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam Rencana Kerja ini tertuang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta pendanaan indikatif bersumber dari APBD. Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna sesuai apa yang diharapkan oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan masukan dari segenap pihak yang berkompeten dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan Rencana Kerja ini.